

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Sherlyn. M. V Tempoh ^{1,*}, Agustinus Pati ², Franky Rengkung³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

* Corresponding Author:

sherlyntempoh5@gmail.com

ABSTRAK

Adanya Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dimana dalam pasal 63 yang berbunyi "Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi lainnya, maka pemberdayaan masyarakat merupakan kewajiban dari pemerintah baik daerah. Namun pada kenyataannya hal ini masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam memberdayakan masyarakat pesisir, khususnya yang berada di Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2006), tentang unsur-unsur pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah daerah sudah sejalan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014, dan peran nyata pemerintah dapat terlihat dari upaya pengembangan potensi pada sektor perikanan, pelatihan-pelatihan yang dilakukan, bantuan modal usaha, dan peningkatan sarana dan prasarana. Memang masih terdapat beberapa kendala yang salah satunya adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang ada.

Kata Kunci: Peran; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud; Pemberdayaan

ABSTRACT

The existence of Law Number 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas, where in article 63 which reads "Local governments are obliged to empower coastal communities in improving their welfare and Regional Governments are obliged to encourage coastal community business activities through increasing community business through capacity building in providing access to technology and information, capital, infrastructure, market guarantees and other economic assets, community empowerment is an obligation of both local governments. However, in reality, this is still not working as expected. This study aims to evaluate the role of the local government of the Talaud Islands Regency in empowering coastal communities, especially those in Kakorotan Village, Nanusa District. This study uses a qualitative method using the approach proposed by Edi Suharto (2006), regarding the elements of community empowerment. The results of the study conclude that the empowerment of coastal communities carried out by local governments is in line with Law Number 23 of 2014, and the government's real role can be seen from efforts to develop potential in the fisheries sector, trainings carried out, business capital assistance, and improvement of facilities and infrastructure. . Indeed, there are still some obstacles, one of which is the low quality of existing human resources.

Keywords: Role; Talaud Islands Regency Government; Empowerment

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km², memiliki potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sangat besar (Bagen, 2001). Luas wilayah perairan Indonesia sebesar 5,8 juta km² yang terdiri dari 3,1 juta km perairan nusantara dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) atau 70 persen dari luas total Indonesia. Keadaan ini menyebabkan kawasan pesisir menjadi andalan sumber pendapatan masyarakat Indonesia.

Persoalan pembangunan masyarakat pesisir dapat di kategorikan menjadi tiga, yaitu 1). Masalah social, yang mencakup isu kemiskinan, kesenjangan sosial, dan konflik sosial Masyarakat 2). Masalah lingkungan, yang mencakup isu kerusakan ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, dan kelangkaan sumber daya perikanan 3). Masalah modal pembangunan, yang mencakup isu pengelolaan sumberdaya yang belum optimal dan masalah surutnya peranan ekonomi desa nelayan beserta tradisi maritimnya.

Sebagai negara yang terdiri atas kepulauan terbesar di dunia, pastinya pelayanan oleh pemerintah pusat terhadap seluruh wilayah yang ada di Indonesia masih memiliki banyak kendala, yang berefek kepada disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan minimnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), serta lambannya angka kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, untuk mentaktisi masalah seperti yang di sebutkan di atas, maka pemerintah pusat mengambil sebuah kebijaksanaan yang di kenal dengan otonomi daerah.

Dalam otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, bahwa daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk di kembangkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk itu, pemerintah daerah di harapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi dan mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya, untuk di manfaatkan secara efektif dan efisien guna terselenggaranya aktifitas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah berkewajiban secara konsisten mengelolah potensi-potensi yang bisa di kembangkan, salah satunya adalah pengembangan dan pengelolaan di wilayah pesisir, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara. Masyarakat harus mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri, sehingga pembangunan dibidang sosial pun perlu dilaksanakan. Menurut Sunyoto (2004:40) kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi (sekaligus politik). Terdapat empat elemen dasar dalam program pembangunan diantaranya adalah; (a) Pembangunan pertanian, (b) Industri perdesaan, (c) Pembangunan masyarakat desa dan (d) strategi pusat pertumbuhan.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang No.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dimana dalam pasal 63 yang berbunyi "Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemberian akses teknologi dan informasi, per-modalana, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi lainnya.

Dari undang-undang diatas menegaskan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam memantau secara berkala, kualitas lingkungan pesisir, baik wilayah darat, payau dan laut/pantai, ditempat-tempat masyarakat melakukan aktivitas budaya. Dengan demikian pemerintah punya data dasar kualitas wilayah pesisir, untuk mengetahui arah pola perkembangannya.

Kabupaten kepulauan Talaud adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan ibu kota Melonguane. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan sangihe dan Talaud pada tahun 2002. Kabupaten kepulauan Talaud terletak di sebelah utara pulau Sulawesi. Wilayah ini adalah kawasan paling utara di Indonesia Timur yang

berbatasan langsung dengan daerah Davao Del Sur, Filipina di sebelah utara. Jumlah penduduknya adalah 109.150 jiwa pada akhir tahun 2019.

Kabupaten kepulauan Talaud merupakan daerah bahari dengan luas lautnya sekitar 37.800 km² (95,24%) dan luas wilayah daratan 1.251,02 km². Terdapat tiga pulau utama di Kabupaten kepulauan Talaud yaitu, pulau Karakelang, pulau Salibabu, dan pulau Kabaruan Serta pulau-pulau kecil lainnya yang masuk ke dalam kriteria daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) antara lain Pulau Miangas, Kakorotan, Marampit, Karatung, Mangumpun, Malo, Intata, Garat, Saraa, dan Pulau Karang Napombalu. Kondisi kabupaten yang masih tertinggal di Indonesia dan sebagian wilayah masih terisolir karena faktor geografis dengan berbagai keterbatasan infrastruktur dasar, ekonomi, sosial budaya, perhubungan, telekomunikasi dan informasi serta ketahanan pangan.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan berbagai macam persoalan di Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. Ada empat persoalan utama yang dihadapi masyarakat desa Kakorotan yaitu kerusakan sumber daya pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa, serta minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan di pemukiman desa.

Hal-hal ini tentunya menjadi tolak ukur sejauh mana pemerintah kabupaten menangani persoalan masyarakat pesisir terlebih khusus di desa Kakorotan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. Masih minimnya perhatian dan belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi tolak awal penulis melakukan penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok). Apabila kita sudah mempercayakan (*trusts*), Patuh Aturan (*role*), dan Jaringan (*networking*) jika memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (*direct*) masyarakat serta mudah mentransfer pengetahuan kepada masyarakat.

Dengan memiliki modal social yang kuat maka kita akan dapat menguatkan pengetahuan (*knowledge*), modal (*money*), dan masyarakat (*people*). Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah Transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Modal sosial yang kuat akan menjamin *suistainable* didalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (*how to build the trust*).

Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan social (Sipahelut, 2010). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan
- c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka. (Suharto, 2006)

Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

Secara harafiah, pemberdayaan bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan” kepada masyarakat yang lemah. Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Namun, hal yang penting dalam proses pemberdayaan yaitu peningkatan kesadaran. Masyarakat yang sadar adalah masyarakat yang memahami hal-hal dan tanggung jawab secara politik, ekonomi, dan budaya.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Dari berbagai pandangan tersebut terlihat jelas bahwa konsep pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun semua lapisan masyarakat. Maka dari itu diambil rumusan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan rancangan pembangunan melalui proses pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang melibatkan seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat di berbagai bidang.

Pemberdayaan dalam konteks alternative pembangunan, dengan demikian menekankan otonomi pengambilan keputusan suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan social melalui pengalaman langsung. Fokusnya adalah lokalitas, karena masyarakat lebih siap di berdayakan lewat isu-isu lokal, meski demikian Friendman mengingatkan, sangat tidak realistis apabila kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar masyarakat di abaikan, Karena itu pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi, tapi juga politik, sehingga masyarakat memiliki daya posisi tawar (*Bargaining position*) secara nasional maupun internasional.

Konsep Pemberdayaan merupakan hasil interaksi di tingkat ideologis maupun praktis. Di tingkat ideologis, konsep ini merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategi* dan *people centered strategi*. Sedangkan di tingkat praktis interaksi terjadi lewat pertarungan antar otonomi. Konsep pemberdayaan, dengan demikian mengandung konteks pemihakan kepada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Memperhatikan uraian tentang *mainstream* teori-teori pembangunan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi rakyat, di mana manusia (individu dan masyarakat) harus menjadi subyek pembangunan. Uji empiris menunjukkan teori-teori yang berpihak pada peran masyarakat luaslah yang lebih berhasil dalam pembangunan di Negara-negara berkembang. Teori yang semata-mata mengandalkan modal social dan sumberdaya alam yang telah usang. Sebaliknya, teori yang berorientasi pada manusia makin unggul dan cenderung berkembang, salah satunya adalah teori ACTORS.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Indonesia, ada tiga hal yang perlu dilakukan melalui teori ACTORS. Pertama, pembangunan perlu diarahkan pada perubahan struktur. Kedua, pembangunan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat guna menuntaskan masalah kesenjangan berupa pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan dengan memberikan ruang dan kesempatan lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ketiga, pembangunan perlu diarahkan pada koordinasi lintas-sektor yang mencakup program pembangunan antarsektor, antar- daerah, dan pembangunan khusus. Dalam pelaksanaan, ketiga arah itu harus dilakukan secara terpadu, terarah, dan sistematis tidak dapat saling dipisahkan. Pada akhirnya pemberian ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dapat bersinergi dengan upaya menanggulangi pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; Kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; Ketiga, melindungi atau memihak yang lemah untuk mencegah

persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini perlu diperkuat dan dimasyarakatkan lewat usaha-usaha nyata menanggulangi kemiskinan dijabarkan melalui program pembangunan sektoral, pembangunan regional, dan pembangunan khusus. Program-program yang dilakukan tersebut sifatnya top-down, sangat sentralistik, dan tidak banyak melibatkan potensi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Peran birokrasi dan intervensi pemerintah sangat dominan dalam pelaksanaannya sehingga memberikan dampak negatif untuk kepentingan jangka pendek. Adanya realita negatif yang berkembang di masyarakat, telah mendorong pemerintah untuk melakukan reorientasi pembangunan serta “revitalisasi” atas konsep pembangunan.

B. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal (adanya ketidakadilan dalam struktur sosial). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka bisa memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal, antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin mereka dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Indikator Keberdayaan Sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto, pemberdayaan menurut Kieffer mencakup tiga dimensi yaitu kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui fokus dan tujuan keberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap usaha dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto. Schuler, Hashemidan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan.
4. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*). Indikator
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa atau kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seorang dianggap berdaya, jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarga; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional maka perlu diketahui beberapa indikator keberdayaan, khususnya keberdayaan dalam bidang ekonomi yang dapat menunjukkan seseorang atau masyarakat itu berdaya atau tidak.

Keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat, secara umum dapat dilihat dari keberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Secara lebih rincinya, menurut Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Mami Suciati (2014), ada beberapa indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi, yaitu :

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.
- d. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

C. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan stimulan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah. Menurut Ndraha, dalam pemberdayaan ada berbagai macam bentuk program pemberdayaan, di antaranya:

1. Pemberdayaan Politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) yang diperintah terhadap pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang menjadi haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain.
2. Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui investasi sumber daya manusia (*human investmen*) guna meningkatkan nilai manusia, penggunaan, dan perakuan yang adil terhadap manusia.
3. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan agar pihak yang diperintah dan lingkungan mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.
4. Pemberdayaan ekonomi, diperuntukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar berfungsi sebagai penanggung diri dampak negatif pertumbuhan, pembayaran resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan. Keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat.

Keterlibatan sasaran dalam tahap perencanaan merupakan satu cara untuk mengajak mereka aktif terlibat dalam proses pemberdayaan. Dengan keterlibatan tersebut, mereka memiliki ikatan emosional yang mensukseskan program pemberdayaan.

Disamping keberhasilan, dalam pemberdayaan juga terdapat kendala yang dialami suatu kelompok. Kendala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah keadaan atau penyebab lain yang dapat menghalangi atau menghambat. Kendala ada sesuatu yang dapat menghambat suatu sistem sehingga tidak dapat mencapai kinerja yang lebih baik. Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan.

Menurut Suharto (2006), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri agar dapat menunjang kemandirian masyarakat tersebut.

3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidakimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok-kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan mendominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokong, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

D. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (*bottom up*), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat. Pertanyaan kemudian muncul apakah konsep pemberdayaan yang salah atau pemberdayaan dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu dari segolongan orang?

Dalam pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir isu utama adalah masih sangat besarnya jumlah masyarakat yang penghasilannya dibawah standar rata-rata yang ditentukan dan masih harus menghadapi masalah kesehatan, kekurangan air bersih, abrasi, dan lain-lain. Hal ini disebabkan belum adanya pengelolaan dengan baik. Menurunnya kualitas lingkungan dan daya dukung, sarana dan prasarana terbatas, demikian pula tingkat aksesibilitas dan dana yang tersedia termasuk program pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Menurut pedoman umum Departemen Kelautan dan Perikanan dalam rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu mendefinisikan wilayah pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut yang terletak antara batas sempadan kearah darat sejauh pasang tertinggi ke arah laut. Sementara menurut Kay dan Alder pesisir adalah wilayah yang unik. Karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Ditinjau dari garis pantai, suatu masyarakat pesisir memiliki dua kategori batas, yakni: 1) Sejajar dengan garis pantai ; 2) Batas yang tegak lurus dengan garis pantai.

Definisi di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat garis batas yang nyata wilayah pesisir. Batas tersebut hanya berupa garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di tempat yang landai, garis ini dapat berada jauh dari garis pantai atau sebaliknya untuk wilayah yang terjal. Maka definisi masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bertempat tinggal di daerah antara pertemuan laut dengan darat, baik kering maupun terendam yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan angin laut dengan sebagian besar penduduk daerah pesisir umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan serta struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum layak dimasuki oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan baik budaya, tatanan hidup, dan kegiatan masyarakat pesisir relatif hidrogen dan masing-masing individu merasa mempunyai kepentingan yang sama dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah disepakati bersama. Orang pesisir adalah raja dari kehidupan di wilayah pesisir dan laut. Mereka mengatur dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitarnya. Dipundak mereka sumberdaya pesisir dan laut diletakkan, ditangan mereka nasib sumberdaya laut berada, berkat mereka fondasi eskonomi terbangun di Negara ini dan karena mereka sebagian potensi sumberdaya perikanan berada diujung tanduk. Banyak orang berpendapat bahwa orang pesisir unik, khas dan berkarakter. Kondisi rilnya memang demikian.

Karakteristik khas dan keunikannya terbangun dari kondisi alam dan aktivitas hidup mereka sehari-hari. Masyarakat pesisir terbentuk dari sebuah tatanan yang kokoh, sentrum

budaya mengakar dalam prinsip-prinsip kehidupan dengan serambi kehidupan yang fundamental dan alamiah. Propaganda sosial melingkari denyut nadi peradaban, menyusun strata dan tirani, sehingga maju dalam sisi yang berbeda.

Kalau kita berkunjung atau berkeliling di wilayah pesisir bagian kepulauan, banyak hal yang bisa dijadikan pelajaran dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Orang pesisir adalah tangguh dan kuat, gigih dan bersemangat, mandiri dan bergotong royong. Orang pesisir memiliki semangat yang besar untuk mengail rejeki di pesisir dan laut. Di bentangan pantai dan hamparan pulau-pulau di pelosok biru Sulawesi Selatan, tersebar sekumpulan orang yang berdiam dan bermukim disana. Tumpuan harapannya hanya dengan memanfaatkan sumber daya perikanan di sekitarnya. Mereka bercengkrama dengan kehidupan yang keras dan penuh dengan tantangan. Aplikasi kehidupannya bertumpuh pada satu tujuan yaitu mengail sesuap nasi dalam bentangan laut nan biru. Tidak sedikit dari mereka harus merangkak untuk hidup dalam keterbelakangan, terpinggirkan, terisolasi dalam kehidupan modern, dan selalu eksis pada diri mereka sendiri. Meskipun demikian, dengan asupan kemajuan yang mulai memasuki dinding kokoh keterbelakangan membuat adanya pemikiran kreatif dari penghuni lumbung potensial perikanan ini untuk mengangkat harkat dan martabatnya, membongkar kemarjinalan cultural dan struktural yang dimiliki menjadi lebih terbuka dalam membuka benang kusut kehidupannya untuk menjadi lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Masyarakat pesisir merupakan salah satu bagian terpenting dari komponen pengelolaan sebab komunitas inilah yang kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada pemanfaatan sumberdaya hayati yang ada pada beberapa ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir.

Dahuri (2008), mengemukakan bahwa masyarakat pesisir adalah sekumpulan orang-orang yang membentuk kelompok masyarakat yang tinggal menetap di wilayah pesisir dan sumber pencaharian utamanya dibidang perikanan. Kita meyakini bahwa masyarakat pesisir dapat menjadi ujung tombak pemberdayaan sumber daya sub-sektor perairan nusantara yaitu dengan memberikan kepastian peran mereka dalam pembangunan. Peran tersebut dapat terwujud apabila ada jaminan kepastian hukum tentang defenisi dan peristilahannya. Masyarakat pesisir sebagai masyarakat yang sumber penghidupannya berbasis perairan juga merupakan bagian integral dari bangsa ini yang keberadaan perannya harus diakui, dilindungi, diberdayakan dan dijamin oleh Undang-Undang.

Masyarakat pesisir dikenal juga sebagai kelompok masyarakat kepulauan. Orang kepulauan memiliki ciri khusus yang membedakan dengan kelompok masyarakat lainnya seperti masyarakat pedesaan. Ciri khusus yang ditampilkan adalah mereka tangguh dan ulet, tegas dan keras serta mudah terkooptasi dengan keadaan.

Selain itu, dinamika kehidupannya berkembang berdasarkan musim dan cuaca. Kelompok masyarakat ini hidup dalam bentangan terik matahari, hujan yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Mereka haus akan kehidupan alam, senja tanpa tantangan alam, sirna tanpa sumberdaya perikanan. Banyak persepsi bahwa masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang kehidupannya monoton, masyarakat yang tidak rela berpindah kelain hati dalam konteks kehidupannya, sehingga mereka hidup dan mati dengan hasil perikanan. Mereka dikenal sebagai nelayan. Usaha lain yang eksistensinya di luar perikanan menjadi bumerang bagi kehidupannya, tidak menjamin kehidupan mereka dan bahkan dianggap dapat mematikan karakter pribadi sebagai makhluk penunggu lautan yang abadi. Masyarakat pesisir sering juga dikatakan sebagai kelompok masyarakat primitif, terbelakang dan eksis pada kemiskinan. Hal ini merupakan pemikiran yang berkembang berdasarkan kemampuan ekonomi mereka dan asupan teknologi serta sumberdaya manusia yang dimiliki. Akan tetapi, hal ini sudah mulai bergeser seiring dengan perkembangan zaman dan mulai adanya respon positif masyarakat terhadap perubahan serta frekuensi perhatian pemerintah dalam menerapkan program pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia.

Dapat terpotret bahwa sejak awal kemerdekaan hingga akhirnya kontrak politik rezim Orde Baru dengan Indonesia, nelayan atau komunitas nelayan kurang memperoleh perhatian pembangunan. Pemihakan kebijakan-kebijakan pembangunan lebih banyak mengarah ke sektor-sektor daratan. Formasi kebijakan yang secara substansial tidak berpihak ke wilayah "pesisir dan laut" sehingga menjadikan masyarakat yang mendiami kawasan pesisir tersingkir dan tersaingi. Keterbelakangan sumberdaya manusia yang secara potensial masih "bersarang" di

kawasan pesisir dan kerusakan ekosistem laut merupakan buah dari kekurangpedulian kebijakan pembangunan tersebut.

Di era perubahan, konstalasi pembangunan mulai disinyalkan pada sektor unggulan perikanan, masyarakat pesisir mulai bergegas melepaskan segala segala gelar ketertinggalan dan kebodohan yang meskipun frekuensi percepatannya masih dikategorikan sangat lambat. Bagaikan siput berlomba lari dengan kanguru. Kemiskinan, kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat pesisir, keterbelakangan sosial, dan masalah-masalah sosial lainnya merupakan akibat yang berjalan seiring dengan kegiatan pembangunan bangsa. Kondisi demikian jika tidak diatasi akan berimplikasi serius terhadap kelangsungan jalannya pembangunan. Karena di dalam sistem pembangunan tidak secara integral disediakan perangkat program untuk mengantisipasi dampak negatif yang diakibatkannya, maka penanganan masalah-masalah sosial masyarakat pesisir yang muncul biasanya dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan pembangunan. Setelah diketahui bahwa kegiatan pembangunan melahirkan sejumlah masalah sosial, barulah kita merencanakan kegiatan untuk mengatasinya, seperti kegiatan pemberdayaan.

Masyarakat di kawasan pesisir juga menghadapi masalah-masalah sosial seperti di atas. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks dan saling terkait satu sama lain. Salah satu faktor yang meningkatkan timbulnya berbagai masalah sosial-ekonomi dan belum signifikannya kontribusi sector kelautan perikanan terhadap perekonomian nasional adalah terbatasnya jumlah warga masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan, yang memiliki keandalan jiwa kewirausahaan. Dalam hal ini, struktur sosial masyarakat pesisir memerlukan lapisan baru yang memiliki wawasan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan berwirausaha, sehingga mereka mampu mengelola potensi sumberdaya pesisir laut, khususnya sumberdaya perikanan, berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang benar. Masyarakat pesisir bagian laut secara mayoritas kehidupannya adalah sebagai nelayan melakukan penangkapan ikan maupun budidaya, tetapi garis komando keterbelakangan tetap melekat pada tiap individu masyarakat yang berdiam ditempat ini. Sebab masyarakat hanya terfokus untuk melakukan kegiatan eksploitasi tanpa pertimbangan kepentingan jangka panjang dan kebanyakan hanya mampu berasumsi untuk mencukupi kebutuhan hidup, sehingga langkah-langkah yang dilakukan hanya berdasarkan pola pikir yang dimilikinya yaitu berpegang pada sosial ekonomi tradisional yang tidak terlepas dari budaya yang dimiliki secara turun temurun.

Upaya pemberdayaan masyarakat sebenarnya sudah tercantum semenjak bangsa ini merdeka. Hal ini tercantum dalam penetapan filosofis dan konstitusional pembangunan masyarakat bangsa Indonesia dalam usaha pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat bagi Bangsa Indonesia terdapat didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea Keempat, yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". "Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja, dan keadilan, diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi potensial dalam meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Strategi pembangunan meletakkan partisipasi aktif masyarakat dalam efektivitas, efisiensi dan sikap kemandirian guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Sedarmayanti, 2004). Karena dalam upaya mencapai tujuan nasional seharusnya tidak hanya dibebankan pada pemerintah saja tetapi juga masyarakat dengan kesadaran dan motivasi untuk ikut berperan aktif dalam proses pembangunan. Sesungguhnya masyarakat memiliki kekuatan yang bila digali dan disalurkan akan berubah menjadi energi besar untuk mengatasi dan menemukan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi. Hal ini didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus urusan tangganya sendiri, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pelaksanaan atas desentralisasi.

Desentralisasi yang dimaksudkan disini adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus urusan-

urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri, dimana luas sempitnya urusan-urusan yang diserahkan kepada suatu pemerintah daerah yang mengatur rumah tangganya sendiri yang sejalan dengan apa yang dituangkan dalam perangkat perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan normatif dalam kehidupan bernegara. Hal ini dapat dilihat lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 :“Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak : a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b)Memilih pimpinan daerah; c) Mengelola aparatur daerah; d) Mengelola kekayaan daerah; e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perturan perundang-undangan”.Uraian tersebut telah memperjelas bahwa hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah semakin besar dan kompleks.

Dengan berdasar hak yang dimiliki oleh daerah, maka peran serta pemerintah daerah dalam pembangunan masyarakat menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera harus diwujudkan secara merata. Hal ini tidak saja pada masyarakat yang hidup dipertanian, akan tetapi pada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sangat terkait dengan proses pengambilan keputusan oleh aparat yang ada di daerah dengan tetap melihat tatanan pemerintahan kita.

Dalam upaya pembangunan masyarakat di daerah, maka pemerintah memegang peran yang sangat sentral dalam pengambilan kebijakan, hal ini terkait dengan budaya setempat, letak geografis, serta model pengambilan keputusan oleh pucuk pimpinan yang ada di daerah. Pembentukan departemen yang khusus menangani masalah perikanan dan kelautan serta sumber daya alam yang terkandung didalamnya.

Dimana lembaga tersebut diharapkan menjadi institusi kebijakan-kebijakan untuk mewakili kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan diharapkan pula menjadi fasilitator serta stimulator pada persoalan-persoalan yang berkenaan dengan sektor perikanan dan kelautan merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh program pengembangan sektor kelautan dan perikanan, baik optimalisasi potensi fisik dan potensi hayati, penguatan sumber daya manusia, peningkatan kerjasama, penguatan kelembagaan, hukum dan perundang-undangan serta ketertiban seluruh stake holder secara bersama dengan komitmen pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada sumber daya. Sebagai wujud realisasi dan implementasi akan komitmen pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan dalam implementasi dan realisasi program-program penguatan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Melalui observasi awal yang dilakukan oleh penulis, terdapat program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepulauan Talaud salah satunya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DISKP) adalah pemberian bantuan modal usaha berupa peralatan seperti mesin untuk perahu nelayan, yang sudah beberapa tahun ini telah terlaksana di desa Kakorotan, kemudian program perbaikan sarana dan prasarana seperti pembuatan pelabuhan laut di desa Kakorotan untuk akses jalan ke wilayah kepulauan Nanusa, Miangas dan sekitarnya. Bukan hanya Dinas Perikanan dan Kelautan yang berperan didalamnya tetapi juga ada peran dari Dinas Sosial, dan Dinas pendidikan Kabupaten kepulauan Talaud dalam menyediakan sarana pendidikan di desa Kakorotan seperti TK (Taman kanak-kanak), SD,SMP dan bantuan pendidikan lainnya, serta ada juga pemberian bantuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berupa bantuan kesehatan, pelatihan seperti pelatihan posyandu, dan lain-lain.

Hal-hal di atas dilakukan pemerintah dalam rangka upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi sekarang yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat pesisir adalah terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut. Oleh karenanya pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana.perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata

dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta membuka akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif (Creswell 2016), dengan fokus penelitian mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Kakorotan kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. Peran pemerintah daerah akan dievaluasi dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Edi Suharto, (2006) tentang unsur-unsur pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokong, dan Pemeliharaan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dikaji dengan tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Kakorotan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh umat manusia. Kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan (Pasurdi Suparlan, 1984). Kemiskinan bersumber pada lemahnya potensi manusia dan kurangnya dukungan lingkungan dalam memanfaatkan potensi alam dan sumberdaya yang tersedia. Untuk memecahkan masalah tersebut dapat ditempuh melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat (A. Soedijar, 2003).

Pada dasarnya kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensional, yang berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan ditandai oleh rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, keterisolasian, keterbelakangan, dan pengangguran, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan antar daerah, antar sektor dan antar golongan penduduk (Sumodiningrat, 1999:2), kemiskinan timbul karena ada sebagian daerah yang belum sepenuhnya tertangani, ada sebagian sektor yang harus menampung tenaga kerja secara berlebih dengan tingkat produktifitas yang rendah, dan ada pula sebagian masyarakat yang belum ikut serta dalam proses pembangunan sehingga belum dapat menikmati hasilnya secara memadai.

Kurangnya informasi tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta kurangnya keterampilan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya potensi sumber daya dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan sosialnya. Kondisi sosial budaya masyarakat tidak selamanya mendukung peningkatan potensi warganya, adakalanya malah menghambat kemajuan masyarakat itu sendiri. Di lain pihak keberadaan manusia, alam dan lingkungan sosial merupakan potensi yang sangat bermanfaat bagi perkembangan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Penanggulangan kemiskinan dengan jalan pemberian bantuan kebutuhan hidup seketika bukanlah upaya pemecahan masalah, namun hanya merupakan bantuan sementara. Kelengkapan penunjang yang diperlukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat meliputi sumber dana, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga, sarana dan prasarana yang kesemuanya itu dapat digali dan diperoleh dari pemerintah, instansi/lembaga non pemerintah dan masyarakat.

Menurut Ryas Rasyid (Kertapraja, 2002:3), kehendak politik pemerintah dalam menegakkan demokrasi melalui asas desentralisasi, adalah harus sungguh-sungguh merupakan desentralisasi kerakyatan, dalam arti bahwa keleluasan otonomi yang dilancarkan kepada daerah bukan untuk mengembangkan kekuasaan birokrasi pemerintah daerah, namun guna memberikan kesempatan kepada rakyat setempat untuk berperan, berprakarsa, dan memberdayakan potensi masyarakat dan wilayah setempat. Dengan demikian kekuasaan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk sebagai wahana dalam

memberikan fasilitasi kepada masyarakat setempat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah program dalam meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia sehingga nantinya masyarakat dapat memiliki sebuah kemandirian dari sisi ekonomi hingga sosial politik dilingkungannya. Dengan begitupun proses pemerintahan akan lebih memberikan pelayanan yang efektif dikarenakan adanya sebuah partisipasi aktif dari masyarakat karena adanya suatu kesadaran untuk berkontribusi dalam pemerintahan khususnya di daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan beberapa temuan dalam observasi lapangan terkait program pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir memang belum berjalan efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah, partisipasi masyarakat yang masih terbatas, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hal ini. Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, di desa Kakorotan sangat memerlukan partisipasi dari masyarakat Kakorotan itu sendiri. Selain itu juga nampak peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mengayomi masyarakat. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa Pemerintah Desa merupakan fasilitator yang menghubungkan antara Pemerintah dengan masyarakat dalam setiap program-program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kepulauan Talaud terhadap masyarakat pesisir yang ada di desa Kakorotan kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. Peran Pemerintah Desa juga untuk mengayomi masyarakatnya dengan melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi dan memotivasi masyarakatnya agar mereka dapat lebih terberdaya, dan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir tidak semata-mata pemberdayaan dilakukan hanya untuk masyarakat nelayan saja. Temuan penelitian menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan itu secara menyeluruh kepada semua masyarakat yang ada di Desa Kakorotan, mengingat para masyarakat memiliki sumber penghasilan yang berbeda-beda yakni; sebagai nelayan (perikanan), pertanian dan perkebunan, usaha mikro kecil seperti kios dan lain sebagainya. Dari beberapa jenis mata pencaharian para masyarakat di atas memang mayoritas penduduk di Desa Kakorotan ini bermata pencaharian sebagai Nelayan dan petani.

Berbagai usaha-usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yakni melaksanakan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat pesisir di Desa Kakorotan dengan melihat beberapa masalah-masalah yang harus ditangani, baik itu kondisi fisik maupun non fisik Desa Kakorotan.

Dengan melihat masalah yang ada, terdapat beberapa strategi pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kepulauan Talaud, meskipun memang belum semua masalah-masalah di atas dapat terselesaikan tetapi pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut dengan variabel penelitian dalam pemberdayaan masyarakat pesisir yang telah di rangkum dari beberapa data yang telah di dapatkan dari penelitian di yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan potensi perikanan
2. Pelatihan
3. Bantuan modal usaha
4. Pemberian bantuan sarana dan prasarana

1. Pengembangan Potensi perikanan

Pengembangan potensi perikanan di kabupaten kepulauan Talaud merupakan realisasi dari program ikan tangkap dinas perikanan dan kelautan kabupaten kepulauan Talaud pada 2019. Program pengembangan potensi perikanan menjadi program pemberdayaan yang cukup memerikan kontribusi besar bagi pengembangan usaha dan manajemen sumberdaya oleh masyarakat. Dengan dilaksanakannya program ini, kurang lebih respon masyarakat terhadap perhatian pemerintah cukup baik. Di pulau Kakorotan sendiri, program ikan tangkap sangat membantu masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan keseharian mereka. Dengan kondisi geografis pulau yang cukup terisolir dari pulau-pulau besar

lainnya, menjadikan akses masyarakat untuk mendistribusikan hasil tangkapan mejadi cukup sulit sedangkan mayoritas masyarakat masih tertinggal dan belum mempunyai sarana seperti perahu milik pribadi. Sejak dari 2019 program ikan tangkap di kabupaten kepulauan Talaud mulai di realisasikan pada daerah-daerah pesisir dengan komoditi utama masyarakat sebagai nelayan. Di pulau Kakorotan sendiri, program ikan tangkap direnspon baik oleh masyarakat, karena sangat membantu masyarakat dalam mengolah sumberdaya perikanan.

Masyarakat Kakorotaan dengan komoditi utama sebagai nelayan, mendapat perhatian yang cukup baik dari pemerintah terutama pada sektor perikanan. Penyediaan sarana seperti kapal bagi nelayan, mempermudah masyarakat untuk mendistribusikan hasil tangkapan, Karena di Kakorotan sendiri yang masih menjadi kendala masyarakat dalam mengolah hasil tangkapan adalah kondisi pulau yang cukup terisolir dari pulau-pulau lainnya. Temuan penelitian menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait hal ini mendapat respon yang baik dari masyarakat, karena merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Berikut adalah respon masyarakat terhadap program ikan tangkap, melalui wawancara dengan salah satu nelayan yang juga adalah ketua salah satu kelompok nelayan di desa Kakorotan, yang menyatakan:

“bagi saya program pemberdayaan seperti ini sangat membantu masyarakat dalam mengolah potensi dan sumberdaya perikanan yang ada di desa kakorotan, saya pribadi merasa sangat terbantu baik dari sarana dan prasarana maupun pelatihan-pelatihan yang sudah di lakukan oleh pemerintah. Tapi ada baiknya program seperti ini perlu di kawal untuk seterusnya agar tidak hanya bentuk fisik yang di realisasikan tapi ada output bagi kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan untuk manajemen sumber daya manusia dalam mengolah potensi perikanan di desa Kakorotan.” (wawancara 19 mei 2021 pukul 11.00 wita)

2. Pelatihan

Pelatihan bagi manajemen sumberdaya manusia pada umumnya sangat penting untuk di perhatikan dan di realisasikan oleh pemerintah Kabupaten. Pemerintah daerah dapat memberdayakan masyarakat pesisir melalui pembuatan peraturan yang tepat. Pemberdayaan yang di maksud adalah untuk menjadikan masyarakat pesisir sebagai masyarakat yang tangguh dan mampu memberdayakan potensi dirinya. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, maupun masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan iklim yang kondusif dan melalukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan, pelatihan dan bantuan lainnya.

Di desa Kakorotan sendiri, dilakukan upaya pemberdayaan seperti penyuluhan atan potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang kemudian dapat di kembangkan. Program pemberdayaan yang di lakukan dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada masyarakat untuk merumuskan sendiri kebutuhan mereka dalam menunjang optimalisasi potensi yang dimilikinya. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah kabupaten kepulauan Talaud dilakukan sebagai upaya mengarahkan masyarakat kepada perubahan pola pikir untuk menumbuhkan kemandirian kepada masyarakat pesisir dalam mengembangkan sumberdaya yang mereka miliki. Pembinaan inipun di orientasikan sebagai bentuk bantuan pemerintah daerah dalam meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat pesisir.

Bentuk pelatihan yang dilakukan adalah dengan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi pada pertemuan-pertemuan yang di prakarsai oleh dinas-dinas dibawah naungan pemerintah. Penyadaran ini di lanjutkan dengan penyuluhan-penyuluhan dan pemberian pelatihan ataupun kursus-kursus singkat yang akan menambah ketrampilan mereka. Apalagi secara umum system pengetahuan mereka baik itu pengetahuan mengenai pengolahan sumber daya masih bersifat tradisional dangan pola usaha individual dan kepemilikan usaha sederhana.

Temuan penelitian juga menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat desa kabupaten Kepulauan Talaud adalah melakukan upaya pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan pemerintah dan perangkat desa serta unsur sumber daya manusia lainnya. Hal ini sangat penting dilakukan karena sangat berdampak bagi kinerja dari sumberdaya manusia yang ada di desa Kakorotan. Hasil pelatihan menggambarkan hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap aparat desa dalam melaksanakan tugas-tugas administratif di desa.

Karena notabene para aparat pemerintah desa Kakorotan hanya berlatar belakang pendidikan rata-rata SMA/ sederajat.

3. Bantuan modal usaha

Bantuan modal usaha adalah salah-satu cara pemberdayaan masyarakat yang di terapkan oleh pemerintah kabupaten kepulauan Talaud de desa Kakorotan. Bantuan modal usaha ini di realisasikan pada beberapa sektor yaitu, perikanan, perkebunan, dan kelompok usaha bersama. Berikut adalah rincian pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat.

- Sektor perikanan
Pada sektor perikanan ada bantuan modal usaha seperti pengadaan parsun (mesin untuk perahu nelayan). Mesin untuk pperahu nelayan dapa menunjang mata pencaharian para nelayan di desa Kakorotan yang biasanya hanya menggunakan peralatan tradisional, masyarakat kini lebih produktif dengan adanya bantuan mesin untuk perahu.
- Sektor perkebunan
Pada sektor perkebunan ada program pemberian bantuan modal usaha seperti pengadaan sensor (alat untuk memotong kayu).

4. Pemberian bantuan sarana dan prasarana

Salah satu hal dari beberapa teori tentang analisis peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat pesisir, dilakukan dengan melaksanakan program yang dapat mendorong pertumbuhan produksi atau hasil tangkap nelayan dengan memberikan akses terhadap fasilitas, peralatan, pelatihan, dan modal. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat desa kabupaten Kepulauan Talaud, bahwa untuk mendukung pengembangan potensi masyarakat maka pemerintah kabupaten kepulauan Talaud telah membangun sarana dan prasarana penunjang yang memadai di desa Kakorotan. Walaupun pada penerapannya masih memiliki banyak kendala dan kekurangan. Sarana dan prasarana tersebut di antaranya adalah:

- a. Sarana dan prasarana penunjang transportasi
Fasilitas transportasi yang di bangun adalah sebagai berikut :
 - Fasilitas transportasi darat berupa jalan lingkar desa
 - Fasilitas transportasi laut berupa dermaga
- b. Sarana dan prasarana penunjang kesehatan
 - puskesmas
- c. Sarana dan prasarana penunjang lainnya
 - PLN
 - Listrik Tenaga Surya (Kincir angin).

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Kakorotan Kecamatan Nenuusa Kabupaten Kepulauan Talaud.

a) Faktor pendukung

1. Partisipasi Masyarakat

Bahwa yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir di desa Kakorotan. Sebagaimana mekanisme kerja yang telah di uraikan, terlihat jelas bahwa partisipasi masyarakat memang sangat dominan dalam setiap tahapan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pesisir ini. Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi. Dapat dilihat dari beberapa kelompok usaha bersama yang dibentuk di desa Kakorotan . Oleh Karena itu kita tidak dapat pungkiri dan memahami dengan jelas bahwa program-program ini hanya bisa berhasil jika mendapat respon yang baik dari masyarakat itu sendiri.

Dari hasil penelitian terlihat pemberdayaan di desa Kakorotan ini sangat didukung oleh partisipasi masyarakatnya, melihat semua kegiatan yang telah dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun swasta sangat disambut baik dan masyarakat antusias untuk ikut turut serta meramaikan dan mengikuti pelatihan. Hal ini tentunya sangat mendukung pemberdayaan

masyarakat pesisir terlebih khusus di desa Kakorotan karena selain dapat menyaksikan kegiatan yang dilaksanakan tersebut, keinginan pemerintah daerah untuk memberdayakan para masyarakat juga dapat tercapai dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk pribadi masyarakat itu sendiri.

2. Kondisi sarana dan prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana di desa Kakorotan merupakan salah-satu modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi suatu dinas. Sehingga, dengan adanya sarana dan prasarana tersebut tujuan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan lainnya dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan berbagai kemudahan dan dukungan kebijakan program agar pemberdayaan yang dilakukan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan sehingga dapat menunjang keberhasilan pembangunan di desa Kakorotan ini kearah yang semakin lebih baik dan lebih maju kedepan.

Temuan penelitian menggambarkan bahwa kondisi sarana dan prasarana di desa Kakorotan yang ada saat ini cukup memadai karena telah banyak pembangunan-pembangunan serta pemberdayaan yang telah dilakukan dari segi perbaikan sarana prasarana tiap tahunnya meskipun pada umumnya belum sepenuhnya terberdaya secara optimal tetapi upaya dari pemerintah daerah cukup baik karena memang dari tahun ke tahun di desa Kakorotan jika diperhatikan sudah banyak mengalami perkembangan. Kerana pemberdayaan di lakukan bukan hanya pada masyarakat saja tetapi kepada peningkatan Sarana dan Prasarana juga sangat penting karena menjadi salah satu factor pendukung keberlangsungan pemberdayaan itu sendiri. Dan tentunya juga lebih mempermudah akses oleh dinas dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat setempat.

b) Faktor penghambat

Beberapa hambatan dan permasalahan dalam pengembangan potensi masyarakat di Kabupaten kepulauan Talaud antara lain:

1. Keterbatasan anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat pesisir di desa Kakorotan. Hal ini dikarenakan anggaran merupakan faktor penggerak seluruh elemen-elemen dari sebuah lembaga pemerintahan.

Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah-satu faktor penghambat berjalan atau tidaknya pelaksanaan pemberdayaan. Karena pada umumnya program dan kegiatan yang di rancangan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Hal ini juga yang menjadi tolak ukur kepedulian pemerintah untuk kawasan pesisir pada setiap perencanaan anggaran. Misalnya dalam satu contoh kasus yang kecil dalam pelaksanaan program pemberian modal usaha kelompok masyarakat seperti kelompok nelayan, kelompok tani dan kelompok usaha mikro kecil menengah ini sangat diperlukan anggaran yang tidak sedikit, anggaran yang sudah di atur perlu untuk di kawal agar sampai dan tepat sasaran kepada semua masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut.

2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia

Secara harafiah kualitas sumber daya manusia mempengaruhi produksi suatu Negara artinya semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia, kegiatan produksi akan semakin efektif dan efisien. Salah satu faktor yang menghambat keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat pesisir adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam hal ini yang dimaksud adalah para masyarakat kawasan pesisir biasanya tidak berlatar pendidikan tinggi, memiliki skil/ketrampilan yang minim serta kurang optimal menggali potensi diri karena berbagai keterbatasan. Terlebih khusus di desa Kakorotan, mayoritas masyarakatnya masih berada pada taraf pra-sejahtera atau kurang mampu. Dengan pengetahuan seadanya masyarakat masih hidup dengan sangat tradisional dan tertinggal. Hal ini tentunya menjadi salah-satu faktor penghambat masyarakat menuju keberdayaan. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan masyarakat desa Kakorotan mampu menggali potensi diri dan menyesuaikan diri dengan berbagai kemajuan teknologi yang nantinya juga akan berdampak pada anak cucu mereka.

PENUTUP

Pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah daerah sejalan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Adapun peran nyata pemerintah dapat terlihat dari:

1. Pengembangan potensi pada sektor perikanan di desa Kakorotan melalui dinas Kelautan dan perikanan kabupaten Kepulauan Talaud sebagai upaya untuk meningkatkan hasil komoditi perikanan dan kelautan guna untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus pendapatan masyarakat di desa Kakorotan.
2. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah kabupaten kepulauan Talaud sebagai upaya penyadaran atas potensi masyarakat. Semua yang terlibat dalam pelatihan ini antara lain Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten kepulauan Talaud, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud, Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Kepulauan Talaud dan tidak terkecuali juga peran serta dari pemerintah desa Kakorotan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Bantuan modal usaha yang di realisasikan pemerintah di desa Kakorotan sangat membantu masyarakat dalam memulai usaha dan lebih progres dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui dinas-dinas terkait sudah mengoptimalkan bantuan modal usaha di desa kakorotan pada berbagai sektor yaitu sektor perikanan, perkebunan, peternakan Babi dan usaha mikro kecil.
4. Dukungan sarana dan prasarana yang laksanakan oleh pemerintah di desa Kakorotan dilakukan dengan harapan dapat menambah tingkat produksi masyarakat dan dapat mendorong dan mengembangkan kondisi perekonomian masyarakat desa Kakorotan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagen, D.G. 2001. **Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan Dan Berbasis Masyarakat**. Makalah Pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat. Bogor, 21-22 September 2001.
- Creswell, John W. 2016. **Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed)**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahuri R, J. Rais, S.P. Ginting Dan M.J. Sitepu, 2008. **Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu**. Cetakan Keempat. PT Pradnya Pramita.Jakarta.
- Edi Suharto, 2006, **Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat**, Bandung : PT Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2004), **Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja**. Bandung: Mandar Maju.
- Sipahelut, M. 2010. **Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan. Tobelo Kabupaten Halmahera Utara**. Universitas Institut Pertanian Bogor
- Suciati, Mami. 2014. **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sekolah Perempuan: Studi Terhadap PNPM Peduli-Lakpesdam NU Bantul**. (Yogyakarta: UIN. Sunan Kalijaga).
- Usman Sunyoto. 2004. **Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**,. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sumber Lain

- Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kekuasaan Pusat Dan Daerah
- Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Provinsi Sulawesi Utara Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2034
- Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Talaud Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034
- Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil